

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/kota Sub Kegiatan : Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 1 Tujuan Kegiatan: Meningkatkan kualitas hidup perempuan, produktivitas	Semenjak Kongres perempuan pertama kali tahun 1928 di Yogyakarta merupakan tonggak sejarah perjuangan bagi kaum perempuan di Indonesia, sehingga pada kongres ke III di Bandung tahun 1938 ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar : 511.725 jiwa dengan komposisi, laki-laki :257.913 dan perempuan 253.812 jiwa perempuan.	Akses <i>Rendahnya pengetahuan dan pendidikan perempuan menyebabkan perempuan lebih bergantung pada laki-laki (Suami) dalam keluarga</i> - Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam penyelesaian kasus-kasus Partisipasi Organisasi perempuan yang ada belum sepenuhnya membantu mengatasi isu-isu kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat	Masih kurangnya pembinaan pada organisasi-organisasi perempuan terhadap perspektif gender sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius	Organisasi perempuan yang ada masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program dan kegiatan Kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dengan unsur-unsur yang ada dalam organisasi perempuan berkaitan dengan identifikasi kebutuhan perempuan dan anak	Meningkatkan kesejahteraan dan Kualitas Hidup Perempuan serta kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan	Melaksanakan sosialisasi Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) Pelatihan/workshop Organisasi Perempuan terhadap Kesetaraan Gender bidang politik Dan Pembinaan Ekonomi Perempuan	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Pelatihan Workshop Organisasi Perempuan (GOW dan DW) terhadap Kesetaraan gender Terlaksananya sosialisasi terhadap Forum PUSPA, terhadap tugas dan fungsi forum untuk mewujudkan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
ekonomi perempuan serta kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui Forum PUSPA Terbinanya organisasi Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan Gender	Data perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 6543 KK. Data rumah KK miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan 45.346 KK Masih kurangnya kontrol terhadap organisasi-organisasi Perempuan dalam menyikapi isu-isu kesenjangan gender terhadap perempuan Terbatasnya tenaga terampil pelayanan ataupun pendampingan korban kekerasan	Kontrol Organisasi Perempuan yang ada belum memahami peran organisasi terhadap isu-isu gender yang ada Manfaat Belum sepenuhnya organisasi perempuan / lembaga pemerhati perempuan lainnya sebagai tempat/wadah untuk menampung aspirasi kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan						

Padang, 26 Maret 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ZULFIAN APRIYANTO, SH.M.Si
198511161986021007